

**ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI DAN EKONOMI  
DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SUMBAWA**

Ahmad Ali Syahputra<sup>1</sup>, Mujibur Rahmat<sup>2</sup>  
*Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas  
Teknologi Sumbawa*  
[ahmadalisyahputra@gmail.com](mailto:ahmadalisyahputra@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan pendekatan Value For Money, yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara dokumentasi berupa data laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dari tahun 2015-2019. Hasil penelitian menunjukkan untuk tingkat ekonomi selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan, tetapi dengan penurunan yang terjadi kinerja keuangan tetap memenuhi kriteria ekonomis. Untuk tingkat efisiensi selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan, serta rasio berada di atas 100% sehingga kinerja keuangan dikatakan tidak efisien. Untuk tingkat Efektivitas selama 4 tahun terakhir mengalami penurunan dan hanya tahun 2016 yang mengalami kenaikan. Rasio efektivitas sudah termasuk dalam kategori cukup efektif dimana pemerintah mampu merealisasikan anggaran pendapatan mendekati target yang telah ditetapkan. Pemerintah diharapkan untuk lebih meningkatkan pendapatan melalui pendapatan asli daerah dan sumber daya secara maksimal.

**Kata kunci: Value for money, Kinerja Keuangan, Ekonomis.**

**ABSTRACT**

*This research aims to find out the performance of Sumbawa regency government with Value For Money approach, namely economy, efficiency and effectiveness. This research is a descriptive quantitative research with data collection techniques carried out by means of documentation in the form of data on the realization of regional revenue and expenditure budgets from 2015-2019. The results showed that the economy has declined for the last 5 years, but with the decline in financial performance, it still meets the economic criteria. For the efficiency level over the last 5 years has increased and decreased, and the ratio is above 100% so that financial performance is said to be inefficient. Effectiveness rates over the last 4 years have*

*decreased and only in 2016 have increased. The effectiveness ratio is included in the category of quite effective where the government is able to realize the revenue budget close to the target that has been set. The government is expected to further increase revenues through local native income and resources to the maximum.*

**Keywords: Value for money, Financial Performance, Economic.**

## **I. Pendahuluan**

Pada era reformasi, pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan mendasar pada sistem pemerintahan. Salah satu perubahan yang mendasar adalah penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, membuka peluang bagi daerah untuk membangun dan mengembangkan daerah sesuai dengan prioritas pembangunannya.

Pemerintahan daerah menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) termuat di dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penganggaran penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pemerintah Daerah (APBD) harus memiliki dasar penganggaran.

Menurut Mardiasmo dalam (Artianti, 2010), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di daerah masing- masing pada suatu anggaran. Pada kenyataannya banyak ditemukan keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas serta kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi dan efektifitas.

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik memicu timbulnya gejolak yang berakar pada ketidakpuasan. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara Negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Dengan kata lain, kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena

masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah (Mahsun, 2018). Dalam triwulan pertama tahun 2020 penyerapan anggaran yang mampu dicapai oleh pemda Sumbawa mencapai 13,41 persen, yang dimana angka tersebut terbilang rendah dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 23 sampai 24 persen. Salah satu kendala yang dihadapi adalah penyebaran virus corona yang berdampak pada kegiatan yang sudah dijadwalkan pemda Sumbawa. Hal lain yang menyebabkan rendahnya serapan anggaran yaitu kelonggaran jam kerja, pemberlakuan menjaga jarak, termasuk pegawai melakukan work home meskipun belum diatur secara regulasi oleh daerah. Di samping itu, Pemda Sumbawa sendiri sudah mendapatkan 7 kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas pelaporan keuangan, akan tetapi predikat WTP itu tidak menjamin pelaksanaan prinsip pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Pengukuran kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan untuk menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif (Mardiasmo, 2009). Salah satu cara untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu dengan melakukan analisis rasio terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Menurut Halim (2007), penggunaan analisis rasio sebagai alat analisis keuangan secara luas sudah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedang pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas.

Berangkat dari keingintahuan untuk menilai kinerja keuangan daerah, hal tersebut tidak lepas dari data-data anggaran dan tetap berpatokan pada kemampuan dari Pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan ringkasan permasalahan yang telah dipaparkan, maka peneliti mengambil judul : **“Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Ekonomi dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2015 – 2019)”**.

## II. Studi Literatur Stewardship Theory

Grand Theory menjadi dasar dalam penelitian ini adalah *Stewardship Theory*. Menurut Davis dan Donaldson (1997) Teori *Stewardship* menggambarkan situasi di mana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. *Stewardship Theory* didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang manajer tidak memiliki kepentingan individu, tapi lebih mengupayakan kepentingan dan keinginan prinsipal serta mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain (Raharjo, 2007).

*Stewardship Theory* memandang bahwa pihak manajemen dalam

organisasi pemerintah daerah diasumsikan sebagai *Steward*/penata layanan yang bekerja penuh tanggung jawab sesuai dengan tujuan organisasi, menggunakan pendekatan *governance* atas dasar psikologi dan sosiologi yang telah didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi manajemen sebagai *stewards* (pelayan) dapat termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan *principal* dan organisasi.

### **Keuangan Daerah**

Menurut Halim (2007), Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan Negara.

Menurut Halim (2007), mendefinisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai rencana operasional keuangan pemda, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan guna menutupi pengeluaran-pengeluaran.

### **Analisis Kinerja Keuangan Daerah**

Menurut Lohman dalam Mahsun (2018), pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya adalah menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD.

### **Indikator Kinerja Pemerintah Daerah**

Jenis indikator kinerja pemerintah meliputi indikator masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penjelasan singkat tentang jenis indikator adalah sebagai berikut :

- 1) indikator masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), sumber daya manusia, peralatan, material dan masukan lain yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.
- 2) Indikator proses (*Process*). Dalam indikator proses, organisasi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan maupun akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang

paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi.

- 3) Indikator keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non-fisik. Indikator atau tolak ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.
- 4) Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil yang lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak.
- 5) Indikator manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat tersebut menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil.
- 6) Indikator dampak (*impact*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

### **Value For Money**

#### 1) Ekonomi

Ekonomi adalah perolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input *value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

Rasio Ekonomis di hitung dengan

Rumus:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Anggaran Pengeluaran}}{\text{Realisasi Pengeluaran}} \times 100\%$$

Ketentuan :

> 100 % = ekonomis

85 s.d 100 % = cukup ekonomis  
65 s.d 84 % = kurang ekonomis

< 65 % = tidak ekonomis

#### 2) Efisiensi

Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Rasio Efisiensi di hitung dengan

Rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times$$

100%

Ketentuan

< 90 % = sangat efisien 90 s.d 99 %= efisien

100 % = cukup efisien

> 100 % = tidak efisien

### 3) Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan output.

Rasio Efektivitas di hitung dengan Rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times$$

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa. Pengambilan data di tempat tersebut dengan tujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Realisasi Anggaran Pendapatan dan

100%

Ketentuan

*Anggaran Pendapatan*

Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran

2015 – 2019. Waktu penelitian

Di atas 100 = sangat efektif

100 = efektif

90 – 99 = cukup efektif

75 – 89 = kurang efektif Di bawah 75 = tidak efektif

### **III. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan jenis data yang digunakan yaitu data primer berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga yaitu Rasio Ekonomi, Efisiensi dan Efektivitas.

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Darmawan (2013), mendefinisikan penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui. Pendekatan deskriptif yaitu berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data jadi yang menyajikan data-data menganalisis dan menginterpretasi.

dilaksanakan pada bulan Juni 2020.

### Sumber Data

Dalam penelitian ini hanya menggunakan sumber data sekunder Menurut Sugiyono (2016) data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Dalam penyusunan penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran yang langsung diperoleh di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa.

### Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan yang bersumber dari dokumen dan laporan hasil anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa dari tahun 2015 – 2019.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Rasio Ekonomis

Pengukuran ekonomi dilakukan untuk melihat seberapa besar tingkat ekonomis Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam mengelola keuangan. Untuk mengukur tingkat ekonomi dapat dilihat dengan melihat perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya dan tingkat pencapaiannya,. Adapaun data anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut: :

**Tabel 1**  
**Rasio Ekonomis Pemerintah Kabupaten**  
**Sumbawa Tahun Anggaran 2015-2019**  
**(Dalam Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran Belanja</b>	<b>Realisasi Belanja</b>	<b>Rasio Ekonomis</b>
2015	1,453,094,563,369. 00	1,329,968,305,103. 51	109,25
2016	1,574,053,964,184. 77	1,485,764,542,537. 79	105,94
2017	1,830,671,897,441. 58	1,730,576,904,223. 74	105,78
2018	1,773,892,233,379. 61	1,684,211,294,640. 21	105,32
2019	1,917,247,255,587. 53	1,834,148,874,114. 43	104,53
Rata - Rata			<b>106,166</b>

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2020

Perkembangan rasio ekonomis mengalami penurunan setiap

tahunnya. Pada tahun anggaran 2015 sampai 2016 mengalami penurunan sebesar 3,32% dan termasuk ke dalam kategori ekonomis. Kemudian tahun anggaran 2016 sampai tahun 2017 juga mengalami penurunan sebesar 0,16% dan

termasuk dalam kategori ekonomis. Pada tahun 2018 rasio ekonomi kembali mengalami penurunan sebesar sebesar 0,46% dan termasuk dalam kategori ekonomis. Kemudian pada tahun 2019 rasio mengalami penurunan sebesar 0,79% dan masih termasuk dalam kategori ekonomis. Hal ini berarti menunjukkan kinerja pemerintah yang baik yaitu biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh belanja lebih kecil dari pada anggaran belanja yang telah ditargetkan.

### Rasio Efisiensi

Pengukuran Efisiensi dilakukan untuk melihat seberapa besar tingkat efisien Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam mengelola keuangan. Untuk mengukur tingkat efisien dapat dilihat dengan melihat perbandingan antara

realisasi belanja dengan realisasi pendapatan. Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa dikatakan efisien apabila rasio yang dihasilkan < 90 atau tidak lebih dari 100%. Semakin kecil nilai rasio efisiensi maka semakin baik kinerja pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Adapun data realisasi belanja dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Rasio Efisiensi Pemerintah Kabupaten**  
**Sumbawa Tahun Anggaran 2015-2019**  
**(Dalam Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Biaya untuk memperoleh pendapatan</b>	<b>Realisasi Pendapatan</b>	<b>Rasio Efisiensi</b>
2015	1,329,968,305,103.51	1,305,142,444,242.40	101,94
2016	1,485,764,542,537.79	1,526,355,151,256.80	97,34
2017	1,730,576,904,223.74	1,675,057,372,641.27	103,31
2018	1,684,211,294,640.21	1,604,617,445,655.24	104,96
2019	1,834,148,874,114.43	1,782,258,661,702.96	102,91
Rata – Rata			<b>102,08</b>

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2020

Dari hasil perhitungan rasio efisiensi, menunjukkan bahwa terjadi kenaikan dan penurunan rasio efisiensi. Rasio efisiensi pada tahun 2015



sebesar 101,9% yang termasuk dalam kategori tidak efisien. Pada tahun 2016 rasio efisiensi mengalami penurunan sebesar 4,56% dan termasuk dalam kategori efisien. Kemudian pada tahun 2017 rasio efisiensi mengalami kenaikan sebesar 5,97% dan kembali berada dalam kategori tidak efisien. Pada tahun 2018 rasio efisiensi kembali mengalami kenaikan sebesar 1,65% dan berada dalam kategori tidak efisien. Tahun anggaran 2019 rasio efisien mengalami penurunan sebesar 2,05% dan masih berada dalam kategori tidak efisien.

Melalui analisis rasio efisiensi dapat diketahui bahwa seberapa besar efisiensi Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam meningkatkan pendapatan daerah. Dari data tersebut, dapat diketahui kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa berdasarkan pengukuran

rasio efisiensi dapat dikategorikan tidak efisien. Dari data selama periode lima tahun, hanya pada tahun 2016 kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa dapat dikategorikan efisien. Hal ini karena pada tahun 2016 jumlah realisasi pendapatan lebih besar dibandingkan dengan realisasi biaya, sementara tahun 2015, 2017, 2018 dan 2019 kinerja pemerintah tidak dikatakan efisien, karena jumlah realisasi pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan realisasi biaya.

### Rasio Efektivitas

Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan sektor publik. Pengukuran tingkat efektivitas memerlukan data-data realisasi pendapatan dan anggaran atau target pendapatan. Adapaun data anggaran dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Rasio Efektifitas Pemerintah**  
**Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran**  
**2015-2019 (Dalam Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Anggaran</b>	<b>Anggaran Pendapatan</b>	<b>Rasio Efektifitas</b>
2015	1,317,472,855,918. 32	1,305,142,444,242. 40	99,06
2016	1,463,183,446,924. 70	1,526,355,151,256. 80	104,31
2017	1,684,200,793,962. 50	1,675,057,372,641. 27	99,46
2018	1,630,984,783,039. 00	1,604,617,445,655. 24	98,38
2019	1,827,810,328,049. 89	1,782,258,661,702. 96	97,51
Rata - Rata			<b>99,74</b>

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2020

Dari hasil perhitungan rasio efektivitas, menunjukkan tingkat rasio efektivitas dari tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan dan penurunan, dimana tingkat rasio efektivitas paling tinggi berada pada tahun 2016 dan tingkat rasio paling rendah berada pada tahun 2019. Rasio efektivitas untuk pada tahun anggaran 2015 sebesar 99,06% dan mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebesar 5,25% menjadi 104,31% menyebabkan rasio efektivitas masuk ke dalam kategori sangat efektif. Kemudian dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 rasio efektivitas mengalami penurunan sebesar 4,86% dan kembali masuk dalam kategori cukup efisien. Tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun 2018, rasio efektivitas kembali mengalami penurunan sebesar 1,07% dan tetap masuk dalam kategori cukup efektif. Tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2019, rasio efektivitas kembali mengalami penurunan sebesar 0,88% dan tetap dalam kategori cukup efektif.

Pemerintah daerah dikatakan berhasil jika dapat merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan. Dari data tersebut, dapat diketahui kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa berdasarkan pengukuran rasio efektivitas dapat dikategorikan cukup efektif. Dari data periode selama lima tahun, hanya pada tahun 2016 yang berada di atas 100%. Namun pada periode selanjutnya tingkat rasio efektivitas mengalami penurunan. Dari hasil perhitungan rasio efektivitas menunjukkan rata – rata rasio efektivitas sebesar 99,74 dan dikategorikan cukup efektif. Hal ini menunjukkan pemerintah Kabupaten Sumbawa belum dapat merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, namun mampu merealisasikan pendapatan mendekati target anggaran yang telah ditetapkan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

#### 1. Tingkat Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2015-2019 dikatakan Ekonomis karena menghasilkan tingkat Rasio Ekonomis berada di atas angka 100%. Hal ini menunjukkan kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang baik, karena mampu mengelola keuangan dengan hemat.

#### 2. Tingkat Efisiensi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2015-2019 dikatakan tidak efisien karena rata-rata hasil perhitungan rasio efisien berada di atas angka 100%. Pada tahun 2016 tingkat rasio kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa 97,34% dan dapat

7

dikatakan efisien karena angka rasio berada pada 90 sampai dengan 99%.

#### 3. Tingkat Efektivitas

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil

kesimpulan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2015-2019 dapat dikatakan cukup efektif karena rata-rata hasil perhitungan rasio berada di angka 99,74%. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Sumbawa mampu merealisasikan pendapatan mendekati anggaran yang telah ditetapkan. Namun, hanya pada tahun 2016 rasio efektivitas dapat dikatakan efektif karena rasio berada di atas 100%.

#### **Saran**

- a. Pemerintah Kabupaten Sumbawa dapat menerapkan konsep *value for money* sebagai salah satu metode yang dapat digunakan untuk menilai penilaian perencanaan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa terhadap realisasinya
- b. Pemerintah diharapkan mampu mempertahankan kinerjanya dari segi ekonomis untuk tahun selanjutnya, karena hasil analisis dari tahun anggaran 2015-2019 sudah Ekonomis.
- c. Pemerintah Kabupaten Sumbawa perlu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan realisasi anggaran di tahun-tahun selanjutnya, agar pencapaian kegiatan dan program dari tahun ke tahun sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau diharapkan.
- d. Pemerintah Kabupaten Sumbawa diharapkan untuk lebih meningkatkan penerimaan atau pendapatan melalui pendapatan asli daerah dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan maksimal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Artianti, N. Y. (2010). *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Studi Kasus Di Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2007*. Universitas Sanata Dharma.
- Daling, M. (2013). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1.
- Darmawan, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. *Business Ethics and Strategy, Volumes I and II*, 22.
- Elizar Sinambela, K. R. A. P. (2016). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 53.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat.
- Jamiyla, Nz, B. I. P., & Meiria, E. (2016). *Analisa Tingkat Efisiensi Penggunaan Keuangan Ditinjau Dari Rasio Anggaran Pendapatan Dan*

*Belanja Daerah Pada Kantor Camat Kalidoni - Palembang Tahun 2012-2014*. 7.

- Kartika, D., Setiawan, A. B., & Kusuma, I. C. (2016). Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi PAD Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Sosial Humaniora*, 7.
- Labi, A. (2019). Analisis kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah daerah kabupaten pulau morotai tahun anggaran 2013 - 2015. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 5.
- Lazyra, K. (2016). Analisis rasio keuangan daerah dalam menilai kinerja keuangan pemerintah kota medan. In *Skripsi Program Studi Akuntansi*.
- Magdalena, M., & Kurniawan, C. H. (2013). Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Modus*, 25.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2018). *Pengukuran Kinerja Keuangan Sektor Publik* (1st ed.). BPF.
- Mardiasmo. (2000). Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah : Implementasi Value For Money Audit Sebagai Antisipasi Terhadap Tuntutan Akuntabilitas Publik. *JAAL*, 4.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik* (IV). Penerbit ANDI.
- Muhibtari, A. N. (2014). *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 *Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019*.
- Pramita, P. R. (2015). *ANALISIS RASIO UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2009-2013* [Universitas Negeri Yogyakarta].
- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi*, 2.
- Sari, D. N., Mintarti, S., & Pattisahusiwa, S. (2018). Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja. *Kinerja*, 15.

Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. PUSTAKABARUPRESS.

Sumenge, A. S. (2013). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Minahasa Selatan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.

Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 7.

Suwanda, D., & Santosa, H. (2014). *Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Berpedoman Pada SAP*. Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  
Tentang Pemerintah Daerah.